



32 Kelurahan Disasar Kota Tanpa Kumuh

YOGYA (KR) - Kota Yogya akhirnya mendapat tambahan sasaran untuk program kota tanpa kumuh (Kotaku) dari pemerintah pusat. Penambahan tersebut pun cukup signifikan lantaran mencapai 150 persen dari kuota awal, yakni dari 12 kelurahan menjadi 32 kelurahan.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman (PUPKP) Kota Yogya Agus Tri Haryono mengungkapkan, penambahan tersebut bisa berdampak pada percepatan pengentasan kawasan kumuh di Kota Yogya. "Sebelumnya memang ada upaya agar sasaran ditambah, dan akhirnya disepakati," ungkapnya, Jumat (30/6).

Oleh karena itu, target nasional agar kawasan kumuh dapat ditekan hingga nol persen pada 2019, bisa semakin mudah dicapai. Apalagi, luasan kawasan kumuh di Kota Yogya saat ini masih mencapai 264,9 hektare yang tersebar di 36 kelurahan. Sehingga, agar target nasional tersebut dapat tercapai, maka Pemkot harus mampu mengentaskan 85 hektare kawasan kumuh pertahun.

Agus menambahkan, dengan adanya 32 kelurahan yang tahun ini menjadi sasaran Kotaku, maka masih ada empat kelurahan lain yang masuk kawasan kumuh. Diharapkan, pada tahun depan seluruhnya sudah dapat disasar agar proses penanganannya se-

makin optimal. "Sebenarnya program Kotaku ini hanya satu bagian yang bersumber dari pusat. Masih ada pembangunan yang dibiayai oleh provinsi maupun daerah. Tapi pola penanganannya memang berbeda," urainya.

Khusus untuk program Kotaku, tiap kelurahan yang menjadi sasaran akan memperoleh bantuan dana investasi. Masing-masing besarnya bervariasi antara Rp 350 juta hingga Rp 500 juta. Dana bantuan itu langsung masuk ke rekening Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) yang ada di tiap kelurahan. Sedangkan pemanfaatannya ialah untuk penataan lingkungan sesuai kebutuhan.

Besaran bantuan tersebut pun diakui belum mampu mengentaskan kawasan kumuh secara maksimal. Sehingga masing-masing kelurahan melalui BKM dituntut kreatif dalam mengemas program penataan tersebut. Dengan begitu, hasil penataan Kotaku dapat terus ditindaklanjuti dengan biaya yang bersumber dari swasta maupun sharing pemerintah daerah.

"Makanya, masing-masing kelurahan harus menyusun tahapan penataan. Pembangunan di Karangwaru bisa dijadikan acuan. BKM setempat bahkan menyusun penataan hingga beberapa tahapan dan berhasil menyedot perhatian para donatur hingga bank dunia," paparnya. (Dhi)-o

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas PUPKP	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 06 Oktober 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005